

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1. Konsep Peran Pemerintah Daerah

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Alfaruqi et al., 2019; R & Agusti, 2019) Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban -kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu yang pertama Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan

tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang (DT Bachrudin_2020), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut: Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit, cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif, Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Peran dapat merujuk pada berbagai konsep tergantung pada konteksnya. Secara umum, peran mengacu pada peran yang dimainkan oleh individu dalam suatu situasi, kelompok, organisasi, atau masyarakat. Peran dapat ditetapkan berdasarkan harapan, tanggung jawab, dan fungsi yang melekat pada individu dalam konteks tertentu. Berikut adalah beberapa pengertian peran yang umum :

Peran dalam Konteks Sosial: Dalam masyarakat, individu memiliki peran yang diharapkan untuk dimainkan berdasarkan norma dan nilai-nilai sosial. Contohnya, peran sebagai anggota keluarga, teman, siswa, pekerja, atau warga negara. Setiap peran ini membawa tanggung jawab dan harapan tertentu dan Peran dalam Organisasi: Dalam konteks organisasi atau perusahaan, individu memiliki peran yang ditetapkan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan posisi mereka. Misalnya, peran seorang manajer, karyawan, atau supervisor. Setiap peran ini memiliki tujuan dan tugas yang harus dilaksanakan oleh individu tersebut.

Penting untuk diingat bahwa peran dapat bervariasi dan seseorang sering kali memiliki beberapa peran dalam kehidupan mereka. Individu juga dapat

mengambil peran yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Peran membantu mengatur perilaku dan interaksi sosial, serta memberikan struktur dalam berbagai situasi kehidupan. Dalam konteks kebijakan publik, peran merujuk pada peran yang dimainkan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik.

Beberapa peran yang relevan dalam kebijakan publik seperti yang pertama (pemerintah) yang memiliki peran sentral dalam pembuatan kebijakan publik, mereka bertanggungjawab untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan yang memengaruhi masyarakat secara luas, pemerintah juga bertugas dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan, mengelola sumber daya publik, dan menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang kedua (masyarakat sipil, termasuk organisasi nirlaba, LSM, dan kelompok advokasi), memiliki peran penting dalam kebijakan publik. Mereka berperan sebagai pengawas pemerintah, mengadvokasi kepentingan masyarakat, menyediakan informasi dan penelitian yang dibutuhkan, serta memberikan suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat sipil berperan dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam kebijakan publik, yang ketiga (sektor swasta), termasuk perusahaan dan asosiasi industri, memiliki peran dalam memberikan masukan dan perspektif dari sektor ekonomi. Mereka dapat memberikan saran dan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan regulasi bisnis, pembangunan ekonomi, dan kebijakan sektor tertentu. Peran sektor swasta sering kali terkait dengan aspek ekonomi dan kepentingan bisnis, yang keempat (ahli dan Peneliti):

Ahli dan peneliti memiliki peran dalam menyediakan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan publik. Mereka dapat memberikan analisis, penelitian, dan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti ilmiah, peran mereka adalah untuk membantu pengambil keputusan memahami implikasi kebijakan, memperkirakan dampaknya, dan menyediakan dasar pengetahuan yang kuat, yang kelima (media: Media massa) memainkan peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang isu-isu kebijakan publik. Mereka menyediakan laporan, analisis, dan pemantauan yang dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kebijakan publik. Media juga dapat memainkan peran sebagai pendukung atau penentang kebijakan tertentu, serta mempengaruhi opini publik. Peran-peran ini saling berinteraksi dan dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik secara keseluruhan. Penting untuk mengakui keberagaman dan konflik kepentingan di antara pemangku kepentingan ini, sambil berusaha untuk mencapai keseimbangan yang baik dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan adil.

Menurut E Gabriel (2020) mengartikan pemerintah sebagai badan yang memproses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen produk-produk pemerintahan akan pelayanan publik dan sipil. Pemerintah (*government*) lahir dari delegasi kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan pemerintah (*governance*) menunjuk pada kemampuan dan spontanitas dari kelompok-kelompok sosial dalam mengatur dirinya sendiri, menunjuk pula pada metode, manajemen, organisasi. *Governance* lebih sebagai gejala sosial, dan lebih luas dari *government*. *Government* memerlukan proses politik. *Governance* menunjukkan adanya tatanan dan

kemampuan sedangkan government menunjuk pada organ. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *governance* tidak sekedar melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.

Menurut Woodrow Wilson (1924: 9), *Government in last analysis, is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but two of a few man, of many man, or of a community prepared by organization to realized its own purpose with references to the common affairsor the community.* Maksudnya pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksudmaksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Menurut E Nurcahya (2019), Pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi., tugas pemerintah antara lain adalah tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan. Peranan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat telah mendunia

secara signifikan selama sejarah umat manusia. Peran pemerintah penting dalam menciptakan keamanan dasar (basic security) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi nasional dan secara kekinian menjamin keamanan kehidupan sosial. Sebagaimana masyarakat kita menjadi lebih kompleks, pemerintah juga menjadi lebih kompleks, lebih berkuasa, dan lebih mendominasi. Kontroversi mengenai betapa besar, berkuasa, dan betapa dominasinya pemerintah akan terus berlanjut dalam sisa sejarah hidup manusia

Pemerintah adalah lembaga atau otoritas yang memiliki kekuasaan politik dan administratif untuk mengatur dan mengelola suatu negara, wilayah, atau entitas politik lainnya. Pemerintah bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk pembuatan kebijakan, penegakan hukum, penyediaan layanan publik, dan perlindungan masyarakat, elemen penting dalam pengertian pemerintah adalah sebagai otoritas dan Kewenangan: Pemerintah memiliki otoritas dan kewenangan yang sah untuk mengeluarkan kebijakan, peraturan, dan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan yang mengikat dan memberlakukan aturan dalam wilayah yang mereka pimpin, Pemerintah dapat beroperasi dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal, regional, hingga nasional, struktur pemerintahan dan wewenang dapat berbeda-beda di setiap negara tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut, seperti demokrasi, monarki konstitusional, atau republik.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia adalah entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan negara Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara republik yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Pemerintah Indonesia

terdiri dari tiga cabang kekuasaan yang terpisah namun saling berhubungan seperti (Eksekutif), Kepala negara dan pemerintahan Indonesia adalah Presiden. Presiden dipilih melalui pemilihan umum dan bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Presiden membentuk Kabinet Indonesia yang terdiri dari menteri-menteri yang bertanggung jawab atas berbagai sektor pemerintahan, seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain-lain. Presiden dan Kabinetnya bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan pemerintahan dan mengelola negara, Lembaga kedua yakni (legislatif) Lembaga legislatif di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR adalah badan perwakilan rakyat yang dibentuk melalui pemilihan umum dan memiliki tugas membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, serta mewakili kepentingan rakyat. DPR terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai partai politik yang terdaftar. Selain DPR, terdapat juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili kepentingan daerah dan memiliki peran khusus dalam legislasi. Dan Lembaga ketiga yaitu sebagai pengawasan jalannya suatu pemerintahan (Yudikatif) lembaga peradilan baik itu mahkamah agung, mahkamah konsitusi, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Dalam hal peran dalam pengupahan untuk perlindungan tenaga kerja, pemerintah Indonesia memiliki peran yang penting dalam kebijakan pengupahan di negara ini. Peran pemerintah meliputi: Menetapkan Upah Minimum: Pemerintah menetapkan upah minimum di Indonesia, yang dikenal sebagai Upah Minimum Regional (UMR). UMR merupakan upah minimum yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pekerja di setiap wilayah provinsi. Penetapan UMR dilakukan

berdasarkan pertimbangan faktor-faktor seperti biaya hidup, inflasi, produktivitas, dan pertimbangan sosial-ekonomi. Pemerintah juga memperbarui UMR secara berkala, umumnya setiap tahun, dan juga pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah memiliki peran dalam mengawasi dan menegakkan kebijakan pengupahan. Mereka memastikan bahwa perusahaan mematuhi ketentuan pengupahan yang ditetapkan, termasuk pembayaran upah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tepat waktu. Pemerintah juga bertugas untuk menindak pelanggaran terhadap kebijakan pengupahan, seperti upah di bawah UMR atau penyalahgunaan tenaga kerja, serta Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas: Selain mengatur pengupahan, pemerintah juga memiliki peran dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing pekerja dan memberikan kesempatan untuk memperoleh upah yang lebih baik. Peningkatan keterampilan dan produktivitas juga dapat berdampak positif terhadap peningkatan upah.

Ketenagakerjaan adalah elemen paling penting pada kehidupan masyarakat Indonesia, sebab sebagai suatu cara untuk seseorang dalam menghidupi dirinya dari hasil bekerja, serta untuk keluarga. UU Tahun 1945 menyebutkan bila “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Bisa dimaknai bila negara memberi hak untuk masyarakatnya agar memperoleh kehidupan serta pekerjaan yang pantas. Pasal 1 Angka 1 PP No 78 Tahun 2015 mengenai Pengupahan menyatakan bila “upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan

dari pengusaha atau pemberi kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Pasal 88 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan disampaikan bila “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang pantas bagi kemanusiaan”. Dalam merealisasikan kesejahteraan serta penghidupan yang pantas untuk tiap warga negaranya, pemerintah sudah menetapkan tentang kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, perlindungan pengupahan, serta penentuan upah minimal.

Unsur yang saling berkaitan didalam pembahasan tentang ketenagakerjaan sangat banyak, yakni unsur pengusaha serta pekerja/buruh. Kedua unsur itu, diantara pengusaha serta pekerja/buruh adalah dua faktor yang tak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Perusahaan akan berjalan dengan baik dengan adanya sinergi kedua faktor tersebut. Begitu pun sebaliknya, seahli apapun pekerja/buruh, saat tidak terdapat perusahaan cuma bisa menciptakan produk pengangguran. Selain itu, pengusaha selaku yang memiliki perusahaan ada dalam posisi yang begitu kuat, karena ditunjang dengan modal yang besar. Pekerja/buruh sekedar memiliki modal keterampilan serta intelektual, dan pekerja/buruh ada dalam kedudukan yang begitu lemah. Kedua posisi tersebut sangatlah tidak sama diantara pengusaha serta pekerja/buruh itu, hal itu kerap dipakai para pengusaha dalam melakukan tindakan yang sesuka hati dengan pekerja/buruh untuk memperoleh hak-haknya yaitu hak upah yang pantas, hak menerima pesangon, hak menerima upah lembur, hak dalam berserikat, hak istirahat, hak cuti yaitu cuti tahunan, cuti hamil, serta lainnya. Muhdar berpendapat Penanganan permasalahan ketenagakerjaan tersebut harus

dilakukan dengan pendekatan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil sehingga muncul sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah.

Fungsi pengawasan mempunyai peranan serta pengaruh yang begitu besar pada sebuah aktivitas. Pengawas dalam hal ini memiliki hubungan yang paling dekat terhadap aktivitas yang diawasinya. Baik buruknya hasil yang diawasi dengan langsung diketahui pengawas. Faktor pemicu kesuksesan pengawasan yang bergantung pada keahlian serta keterampilan pengawasan. Kantor disnaker yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah, terkait hal ini Disnaker di daerah, ialah pelaksana tugas serta fungsi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi disektor pembinaan ketenagakerjaan serta pengawasan norma kerja di daerah. Salah satunya yaitu pengawasan dari penyelenggaraan UMK Kabupaten di tiap daerah, Kantor Disnaker sangat mempunyai peran serta tanggungjawab pada pengawasan penyelenggaraan Upah Minimum tiap daerah. Kewenangan sektor ketenagakerjaan pada otonomi daerah begitu luas, berhubungan dengan hal tersebut, maka daerah bisa menaikkan kualitas serta kuantitas pengawasan ketenagakerjaan yang diselenggarakan Dinas Tenaga kerja di daerah.

2.1.2. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah

Peran pemerintah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang umumnya mempengaruhi peran pemerintah: yang pertama dengan adanya Sistem Politik: Sistem politik suatu negara dapat memengaruhi

peran pemerintah. Misalnya, dalam sistem demokrasi, pemerintah cenderung berperan sebagai perwakilan rakyat dan melaksanakan kebijakan yang mendukung kepentingan publik. Di negara otoriter, peran pemerintah mungkin lebih terpusat dan kurang melibatkan partisipasi publik, yang kedua Undang-Undang dan Konstitusi: Hukum dan konstitusi suatu negara juga mempengaruhi peran pemerintah. Undang-undang mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, sementara konstitusi menyediakan kerangka kerja yang mengatur hubungan antara pemerintah, warga negara, dan lembaga-lembaga negara lainnya, yang ketiga karena Tekanan Masyarakat: Masyarakat dapat mempengaruhi peran pemerintah melalui tekanan politik dan sosial. Demonstrasi, petisi, dan opini publik dapat mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tertentu atau mengubah kebijakan yang ada, yang keempat Kondisi Ekonomi: Kondisi ekonomi suatu negara juga dapat mempengaruhi peran pemerintah. Ketika perekonomian mengalami tekanan, pemerintah mungkin terlibat dalam kebijakan stimulus ekonomi atau regulasi untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi atau melindungi kepentingan nasional.

Peran pemerintah dapat bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada berbagai faktor ini dan banyak faktor lainnya tergantung dari Perkembangan Sosial dan Lingkungan: Perkembangan sosial dan masalah lingkungan juga dapat mempengaruhi peran pemerintah. Isu-isu seperti perubahan iklim, keberlanjutan, kesenjangan sosial, dan kesejahteraan masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih aktif dalam menangani masalah-masalah ini, serta dalam tekanan Global: Faktor-faktor global seperti hubungan internasional,

perjanjian perdagangan, atau tekanan dari organisasi internasional juga dapat mempengaruhi peran pemerintah. Pemerintah mungkin harus menyesuaikan kebijakan mereka dengan norma-norma internasional atau mempertimbangkan dampak global dalam pengambilan keputusan

Secara umum, keberadaan negara memiliki pengaruh ekonomi pada tingkatan yang berbeda. Ada pemerintah yang mengatur ekonomi secara ketat atau intensif, dan ada juga pemerintah yang membatasi mereka sebagai pendukung ekonomi. Tugas negara dalam perekonomian antara lain mendorong perkembangan perusahaan secara umum, mendorong persaingan yang sehat antar perusahaan, mendukung kelompok ekonomi lemah dan bertindak sebagai penyeimbang. Dalam perekonomian negara, peran pemerintah adalah mengatur, meningkatkan atau menginterupsi kegiatan ekonomi baik negara maupun swasta. Oleh karena itu, pembangunan dan kemajuan negara sangat tergantung pada peran pemerintah dalam mengelola negara, antara lain di dalamnya adalah perekonomian. Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Tentang hubungan kerja Pemerintah Indonesia bertindak sebagai pelindung pekerja, misalnya dalam bentuk perjanjian berbagai peraturan perundang-undangan Keputusan pemerintah dan keputusan menteri sebagai iringan tambahan. Dengan rela juga Asisten penyelesaian sengketa Pekerja/karyawan dengan pemberi kerja/kontraktor menemukan titik temu di antara para pihak untuk memperoleh hak-

hak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa kasus kerja di Indonesia terkadang cenderung menimbulkan kerusuhan itu mengarah pada anarki. Tugas pemerintah adalah menemukan akarnya masalah dan mencari solusi berdasarkan prinsip win-win solution dari peraturan hukum. Menegakkan diharapkan perselisihan muncul dalam pertemuan dimana kedua belah pihak menyampaikan "kejujuran". Itu seharusnya menjadi penulis "profesional". faktor mahal dalam beberapa solusi Masalah atau konflik antar pekerja/karyawan dengan pemberi kerja/majikan. Juga "Kedewasaan" bagi pekerja dan pemberi kerja memecahkan semua masalah.

Penyediaan lapangan kerja menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam situasi politik yang belum stabil apa yang ditawarkan negara selain upah tenaga kerja murah, Namun jika kebijakan tersebut dilaksanakan, pemerintah akan terjebak paradigma lama dalam kebijakan perburuhannya. Di dalam Dalam hal ini, pemerintah harus mempertahankan posisinya Basis perhitungan UMR adalah 80 persen Kebutuhan Hidup Minimum (MNR). Pemerintah juga harus memahami dan mendorong Karyawan/pegawai untuk penerimaan pesanan Koreksi yang telah diperbaiki. upaya tersebut harus diimbangi dengan garansi resmi karyawan untuk menyalurkan usaha/ secara sah dan Pemerintah berusaha membangun institusi Pengadilan Perburuhan Mandiri

konflik kepentingan antara para pekerja dan pemberi kerja/pengusaha melanjutkan ketika pemerintah tidak bisa Menyederhanakan hukum dan peraturan dan meningkatkan keterampilan (kualifikasi) melalui pendidikan. dengan mengadaptasi standar kualifikasi tuntutan dunia usaha dan dunia. Dengan kata lain,

masalah Pembekalan calon pekerja melalui “pelatihan”. diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan dan pendidikan melalui filosofi penghubungan keterkaitan dengan akses "sistem ganda" atau sistem ganda. mendekati yang harus didekati Pendidikan dengan dunia usaha/industri. Ini serius dan perlu segera diperbaiki Kemdiknas (pendidikan) dan Kemnakertrans (Pelatihan) apa batasan spesifiknya yang menjadi tanggung jawab setiap orang kementerian Selama tidak ada kekuatan resmi kedua kementerian kemudian masalah kemauan calon pekerja tidak pernah Ada solusi untuk masalah yang mendasarinya. Perlindungan terhadap yang lemah secara empiris tercatat dalam UUD 1945 bentuk keadilan sosial kekeluargaan. Ditambah lagi dengan sikap negara Hubungan dan tanggung jawab antara pekerja/karyawan dan pengusaha kewajiban yang harus di ikuti. Dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945 Upaya pembentukan Kementerian Kesejahteraan yang mengerjakan, mengurus fakir miskin, anak yatim dan zakat fitra Akhirnya, kementerian memutuskan sebagai penanggung jawab Kementerian Sosial pekerja, miskin,

2.1.3. Pengertian Upah Pekerja

Upah kerja merujuk pada kompensasi yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk gaji atau upah untuk pekerjaan yang dilakukan. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja: Tingkat upah sering kali dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Jika permintaan tenaga kerja melebihi penawaran, maka cenderung terjadi peningkatan upah karena perusahaan bersaing untuk mendapatkan pekerja. Sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja melebihi

permintaan, maka cenderung terjadi penurunan upah karena persaingan yang lebih tinggi antara pekerja. Dan juga karena Faktor Geografis: Tingkat upah juga dapat bervariasi berdasarkan lokasi geografis. Biasanya, di daerah perkotaan dengan biaya hidup yang lebih tinggi, upah cenderung lebih tinggi daripada di daerah pedesaan.

Regulasi Pemerintah, Pemerintah memainkan peran dalam menetapkan upah minimum atau mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha melalui undang-undang atau kebijakan lainnya. Upah minimum dapat menjadi acuan untuk menentukan tingkat upah di beberapa sektor atau wilayah. Selain itu, pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan tunjangan, perlindungan kesejahteraan pekerja, dan aspek lain yang berdampak pada upah serta Tingkat Pendidikan dan Keterampilan: Tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja juga mempengaruhi tingkat upah. Pekerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi biasanya memiliki peluang untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi karena memiliki nilai tambah dalam pasar tenaga kerja.

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan wajar yang diterima karyawan atas pengabdianannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Upah adalah kompensasi langsung yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, barang yang diproduksi, atau jumlah pekerjaan yang disediakan. Tidak seperti gaji yang relatif tetap, jumlah gaji bervariasi. Konsep gaji biasanya mengacu pada proses pembayaran mandiri. (Ns Purnama, G Gunawan_2020)

Penetapan gaji merupakan standar perusahaan. Jadi, seorang karyawan yang melakukan pekerjaan di perusahaan multinasional dapat dibayar sesuai standar internasional. Gaji benar-benar bisa memenuhi standar perusahaan. Namun, dasar utama penentuan gaji adalah kebijakan dan peraturan pemerintah, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dll. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan biasanya mempengaruhi nominal gaji juga. Dalam hal gaji, waktu pemrosesan suatu pekerjaan tidak memengaruhi tingkat gaji. Namun, pengalaman keseluruhan dan masa kerja dapat memengaruhi tingkat gaji. Kemudian kerumitan pekerjaan juga menjadi salah satu kriteria untuk menentukan gaji. Secara umum, semakin kompleks pekerjaan, semakin tinggi gaji karyawan. Dalam hal gaji, tingkat tanggung jawab yang biasanya berkaitan erat dengan tingkat tugas merupakan salah satu kriteria penentuan gaji. Selain fakta bahwa keahlian, pengetahuan spesialis, dan tingkat pendidikan seringkali menjadi faktor yang juga diperhitungkan saat menentukan gaji. (MY Mahendra - At-Tasyri_2021).

Kebijakan pengupahan menurut I Ahmaddien, NH Sa'dia (2020) yang diatur negara meliputi upah minimum, struktur dan skala upah, upah lembur, upah absensi dan/atau ketidakhadiran karena alasan tertentu, bentuk dan jenis pembayaran upah, upah item yang dapat dihitung; dan gaji sebagai dasar penghitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Mari pelajari lebih lanjut tentang kebijakan pembayaran ini. Menurut pasal 30 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (UU 13/2003), upah adalah hak pekerja, yang diterima dari pemberi kerja atau pemberi kerja sebagai imbalan bagi pekerja dan dinyatakan dalam uang, tetap dan dibayarkan dalam kontrak kerja, kontrak. atau Peraturan perundang-undangan,

termasuk manfaat bagi karyawan dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukan atau akan dilakukan.

Meskipun gaji biasanya dibayar dalam bentuk uang, Bagian 1601-p KUH Perdata menangani masalah ini dan menyatakan bahwa gaji dapat berupa jenis lain sebagai berikut. Gaji dapat berupa makanan, bahan bakar dan bahan penerangan, seragam dinas atau seragam kerja, hasil perusahaan yang dialokasikan untuk karyawan. Jumlah nominal selama liburan dan lain-lain. Mengenai upah yang dibayar dengan uang, Pasal 1602h mengatur bahwa upah harus dibayar dengan alat pembayaran yang sah, yaitu mata uang Indonesia. Jika gaji ditentukan dalam mata uang asing, perhitungannya didasarkan pada nilai tukar pada waktu dan tempat pembayaran. Namun, peraturan ini disebut berdampak negatif bagi masyarakat, terutama bagi kehidupan kerja. Undang-undang Cipta Kerja lebih lanjut mendorong fleksibilitas bagi pekerja dengan merevisi atau menghapuskan berbagai jenis perlindungan pekerjaan. Permasalahan investasi bukan hanya masalah pekerja bagi pengusaha, tetapi harus diselesaikan dengan mengusulkan kebijakan "tenaga kerja murah".(Nabilla Umroh Yuliatul KoridaM. Muhsin_2021).

Permasalahan terkait upah kerja dapat melibatkan beberapa isu yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja mulai dari upah yang di bayar sangat rendah, banyak pekerja di berbagai sektor dan negara menerima upah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga mereka. Upah rendah dapat menyebabkan kesulitan finansial, kesenjangan pendapatan, dan kesulitan dalam mencapai tingkat hidup yang layak, belum lagi permasalahan mengenai ketimpangan upah karena ada perbedaan pembayaran antara pekerja, dan juga

adanya ketidakpastian kontrak kerja yang di berikan pihak perusahaan hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan, kekurangan jaminan sosial, dan kesulitan perencanaan keuangan jangka panjang.

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini dapat memperkaya teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini. Dalam proposal ini penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Untuk menghindari terjadinya duplikat dalam penelitian ini maka perlu dipertegas dengan merangkum masing-masing penelitian terdahulu

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Nashahta Ardhiaty Nurfiat (2020)	Pengaruh Upah Dan Teknologi Terhadap Produktivitas Dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kualitatif	produktivitas kerja adalah tingkat upah, teknologi, keamanan dan perlindungan, suasana kerja yang baik, promosi dan

		Pada Industri Mebel Di Kota Denpasar		pengembangan diri keorganisasian. Penelitian ini lebih fokus pada faktor tingkat upah dan teknologi karena faktor lain tidak terjadi pada usaha industri yaitu industri mebel di Kota Denpasar.
2.	Rina Riyanda, Atnasiun Dola (2020)	Peran Disnaker Kota Batam Terhadap Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean	Kualitatif	Peran pemerintah begitu penting untuk membangun sumber daya manusia. Pemerintah bisa bekerja sama dengan berbagai pihak baik itu akademisi, pengusaha, maupun legislator untuk membuat kebijakan seperti pelatihan atau sertifikasi keahlian.

3.	Bulan Purnama Utami, Nabila Azahka, Uti Aprilia Handayani (2023)	Persepsi Masyarakat Kota Batam Terhadap Ketersediaan Lapangan Pekerjaan di Kota Industri	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat beranggapan ketersediaan lapangan kerja di Batam belum maksimal karena masih banyak pengangguran - Minimnya pengalaman kerja yang menjadi syarat utama untuk bisa bekerja.
4.	Pristika Handayani_2019	Pelaksanaan upah minimum kota bagi tenaga kerja harian pada tahun 2017 di Kota Batam	Kualitatif	Pekerja harian yang tidak berstatus kontrak juga diwajibkan mendapat gaji yang sesuai dan sudah ada aturan yang harus diikuti pengusaha yang tertera dalam

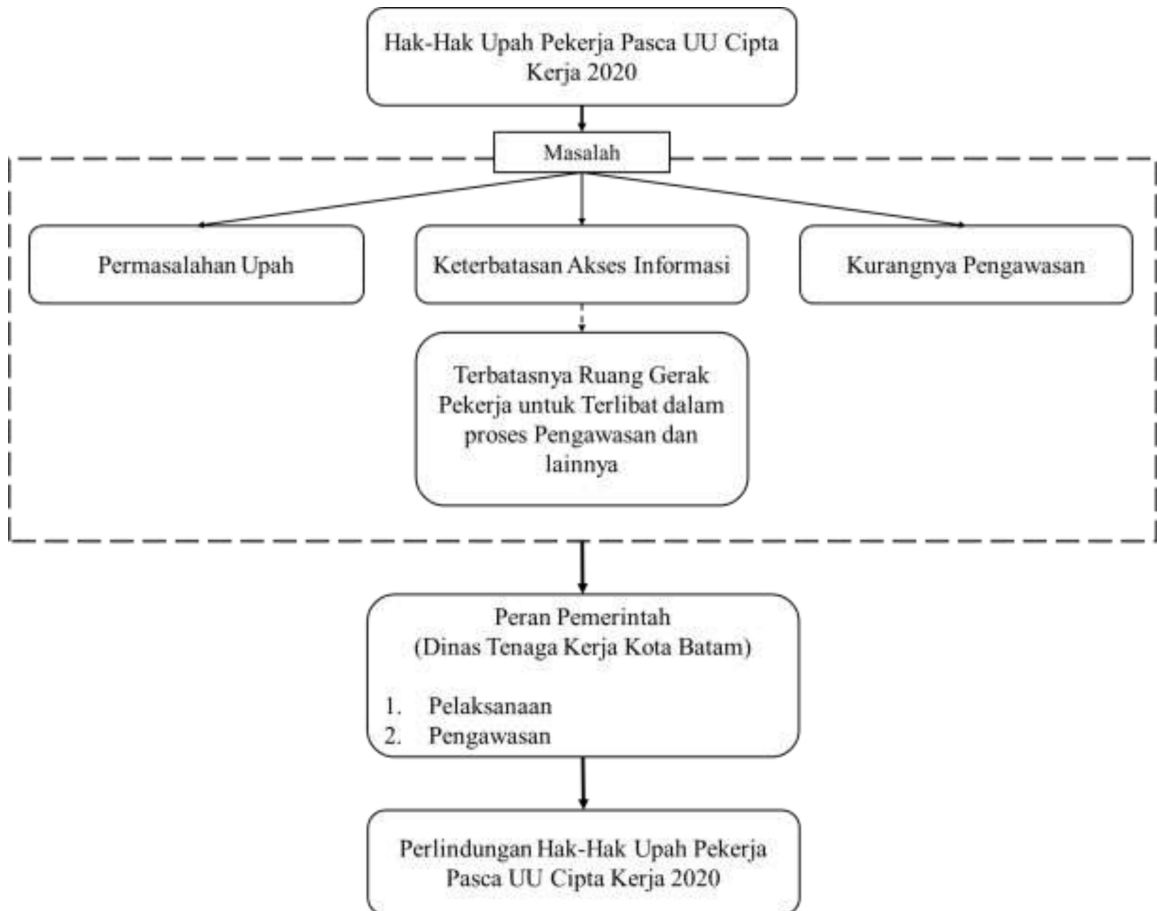
				keputusan gubenu tentang upah minimum kota batam
5.	Imas novita juiningsih (2020)	Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Di Saat Pandemic Covid 19	Kualitatif	Dalam dinamika ketenagakerjaan di Indonesia, hubungan kerja tidak serta merta berjalan dengan optimal atau dapat dikatakan mengalami permasalahan yang bisa disebabkan oleh si pekerja atau pun perusahaan. Diantara pekerja yang merasa dirugikan dengan kebijakan dari perusahaan, maupun perusahaan yang merasa dirugikan dengan kelalaian para pekerja. Dari faktor tersebut, maka dapat

				<p>memungkinkan adanya perselisihan antara pekerja dan pengusaha dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Sehingga, beberapa perusahaan mengeluarkan kebijakan untuk memutus hubungan kerja dengan beberapa pekerja yang dirasa mengakibatkan menambah kerugian perusahaan.</p>
--	--	--	--	---

6.	Edwin Basma, Rachmat Sugeng (2020)	Respon Masyarakat Terhadap Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia	Kualitatif	Akibat dari meningkatnya pengangguran maka bisa membuat mundurnya perekonomian suatu negara. Pengangguran tidak bisa di pisahkan dengan upah. Karena jika upah di naikkan maka perusahaan akan mengurangi pekerja.
7.	Widya Reza, Puri Rahayu (2022)	Persepsi Pengaruh Nilai Investasi, Tingkat Upah dan Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Batam	Kualitatif	Sektor Perekonomian dalam penyerapan tenaga kerja adalah industri, keberhasilan ekonomi suatu negara di lihat dari kesempatan kerja, nilai investasi dan produksi mempengaruhi

				penyerapan tenaga kerja.
--	--	--	--	-----------------------------

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja adalah undang-undang yang diadopsi oleh Indonesia pada tahun 2020 dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki regulasi bisnis di negara tersebut. Undang-undang Cipta Kerja Tahun 2020, memberikan kerangka hukum untuk menetapkan dan menegakkan upah minimum. Undang-undang ini menetapkan hak pekerja untuk menerima upah yang adil dan menguraikan kewajiban pengusaha untuk mematuhi peraturan pengupahan. Upah

minimum, sebagaimana ditentukan oleh pemerintah daerah, berfungsi sebagai tolok ukur untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan remunerasi yang memadai. Pemerintah menetapkan tingkat upah minimum berdasarkan faktor-faktor seperti biaya hidup, untuk memastikan bahwa pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mencapai standar hidup yang layak. Pemerintah memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan, termasuk peraturan upah minimum. Ini melibatkan pengawasan aktif dan pemeriksaan tempat kerja untuk memeriksa apakah pengusaha membayar pekerja sesuai dengan upah minimum yang ditentukan. Kegiatan pemantauan bertujuan untuk mendeteksi ketidakpatuhan, mengidentifikasi pelanggaran, dan mengambil tindakan penegakan hukum yang tepat terhadap pemberi kerja yang gagal mematuhi.